LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018.

LKjIP Dinas Perikanan Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna telah diukur,dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Ranai, *28* Januari 2019

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

ZAKIMIN, S.Pi
NIP 19690204 199803 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Natuna tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Capaian Kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna diperhitungkan dengan cara membandingkan antara Rencana Kinerja dengan Realisasi Kinerja yang telah dicapai, akuntabilitas Kinerja dibandingkan dengan akuntabilitas penyerapan anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018. Untuk Pelaksanaan dan pencapaian target sasaran strategis, program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2018 secara umum melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai Indikator Kinerja Utama dan 1 (satu) sasaran strategis sebagai Non

Indikator Kinerja Utama yang tercakup dalam 4 (empat) program sebagai Indikator Kinerja Utama dan 4 (empat) program sebagai Non Indikator Kinerja Utama serta 7 (tujuh) kegiatan sebagai Indikator Kinerja Utama dan 14 (empat belas) kegiatan sebagai Non Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2018 dapat dicapai hal ini menunjukan adanya komitmen penuh dari Pimpinan (kepala dinas) beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Dinas Perikanan kabupaten Natuna untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2018. Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang. Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi keuangan pada tahun 2018, maka dapat dinyatakan bahwa secara keseluruhan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018 berhasil dengan predikat memuaskan. Untuk waktu yang akan datang, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna akan terus melakukan langkah-langkah peningkatan kinerja dengan meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur, memaksimalkan anggaran berbasis kinerja.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

DAFTAR GRAFIK ..... **viii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG 1
1.2. LANDASAN HUKUM 2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 4
1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 5
1.5. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPAN 7
1.6. SISTEMATIKA PENYUSUNAN 10

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD TAHUN 2016 -2021 13
2.2. RENCANA STRATEGIS 15
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 17
2.4. PROGRAM KERJA DAN KEGIATA 20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 23
3.2. REALISASI ANGGARAN 27

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
TABEL.I.1.	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018	8
TABEL.II.1.	INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	18
TABEL.II.2.	JUMLAH INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	19
TABEL.II.3.	INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA	19
TABEL.II.4.	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018	21
TABEL.II.5.	ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018	22
TABEL.III.1.	REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018	29
TABEL.III.2.	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2018	31
TABEL.IV.1.	ALOKASI DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2018	33
TABEL.IV.2.	ALOKASI DAN REALISASI PENYERAPAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS TAHUN ANGGARAN 2018	33

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR **HALAMAN**

GAMBAR.I.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUN 12

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK **HALAMAN**

GRAFIK.I.1. GRAFIK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 10

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN **HALAMAN**

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 36
2. PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2018 DINAS PERIKANAN 38

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep *goodgovernance* atau tata pemerintahan yang baik memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan antara lembaga lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, sektor swasta dan masyarakat. Dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme.

A*kuntabilitas* akan mendorong setiap aparat pemerintahan daerah untuk melaksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerahnya. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik atau masyarakat adalah suatu ukuran yang menunjuk pada seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki *stake holder.*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa setiap Instansi Pemeritah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penyusunan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya LKjIP Dinas Perikanan Tahun 2018 dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.Berdasarkan acuan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, penyusunan LKjIP Dinas Perikanan Kabupaten Natuna didasarkan pada indikator kinerja yang ada yang ditetapkan lewat tujuan dan sasaran yang direncanakan. Realisasi dan dilaporkan dalam LKjIP ini adalah realisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 berdasarkan perjanjian kinerja yang telah disusun pada Tahun 2018.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, KabupatenKuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pelaporan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna;
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 56).

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perikanan setiap tahun merupakan perwujudan dari implementasi sistem pengendalian terhadap Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perikanan yang dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian yang selaras. Maka atas dasar ini siklus Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diawali dengan Penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Natuna dan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017 - 2021, dan setiap tahun ditetapkan program dan kegiatan untuk dilakukan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Natuna tersebut.

Selanjutnya sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana perolehan keberhasilan atas capaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna serta pada akhir periode capaian kinerja yang berhasil diperoleh atas pelaksanaan program dan kegiatan dilaporkan kepada Bupati Natuna sebagai pemberi amanah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Tujuan

Adapun tujuan dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah :

1. Untuk menyampaikan pertanggungjawaban Kinerja Kepala Dinas Perikanan kepada Bupati Natuna dan pihak yang berkepentingan;
2. Untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang, dan
3. Untuk dijadikan bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagı pıhak yang membutuhkan.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

a. Dasar Pembentukan

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6). Berdasarkan Peraturan ini Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta berjalannya tata laksana dan tata kerja kedinasan maka Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Tugas pokok yang diemban Dinas Perikanan adalah menjalankan dan melaksanakan Kewenangan Otonomi dibidang Kelautan dan Perikanan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
b. Pemberian Perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Perikanan;
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas Perikanan.

d. Kewenangan

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Penataan dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;

2. Penetapan kebijakan dan pengawasan ekploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut kewenangan daerah Kabupaten;
3. Pemberian izin dan pengawasan pemasangan rumpon di wilayah perairan kewenangan daerah Kabupaten;
4. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan;
5. Pembangunan dan pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
6. Pembinaan pemukiman nelayan;
7. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana Perikanan;
8. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;
9. Pemberian izin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil Perikanan;
10. Pemberian izin pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam dalam perairan laut wilayah lingkup kewenangan Kabupaten;
11. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan;
12. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang Kelautan dan Perikanan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten;
13. Penyusunan Rencana Bidang Kelautan dan Perikanan;
14. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan Internasional atas nama daerah di bidang Kelautan dan Perikanan;
15. Penyelengaraan riset dan teknologi bidang Kelautan dan Perikanan yang tidak berisiko tinggi;
16. Penyelenggaraan sistem Kelautan dan Perikanan;
17. Penyelenggaraan promosi Kelautan dan Perikanan;
18. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh Peraturan Perundang-undangan;

19. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama bidang Kelautan dan Perikanan;
20. Pengendalian, pengawasan dan pemberantasan terhadap Illegal Fishing.

1.5. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

Susunan organisasi Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris :
   a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Nelayan, membawahi :
   a. Seksi Pembinaan Nelayan Kecil
   b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan
   c. Seksi Perlindungan Nelayan Kecil
4. Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk, membawahi :
   a. Seksi Penataan dan Pembinaan Pemasaran Perikanan
   b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana TPI
   c. Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Pengelolaan TPI
5. Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya :
   a. Seksi Pembinaan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya
   b. Seksi Perbenihan dan Penyakit Ikan
   c. Seksi Perizinan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten Natuna didukung Oleh sumber daya manusia dengan jumlah dan komposisi Kepegawaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berjumlah 94 Orang, termasuk pegawai Kantor Cabang di Kecamatan dengan rincian

terdiri dari : 5 Orang Gol IV, 23 Orang Gol III, 28 Orang Gol II, 38 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Daftar nominatif pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat dari Tabel I.1 dan sumberdaya manusia Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Grafik I.1 serta Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar I.1.

TABEL I.1.
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN					PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	PTT	S2	S1	D3	SMA	SUPM	SMP	SD
(1)	(2)	(3)				(4)					(5)						
1.	**Kepala Dinas**	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2.	**Sekretaris**	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Kasubag Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Staf PNS	-	-	-	-	1	6	16	-	-	2	3	-	12	5	1	-
	d. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	2	2	20	2	2	2
3.	**Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan**	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	a. Seksi Pembinaan Nelayan Kecil	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Seksi Perlindungan Nelayan Kecil	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
4.	**Kepala Bidang Pengelolaan Daya Saing Produk**	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Seksi Penataan dan Pembinaan Pemasaran Perikanan	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN					PENDIDIKAN						
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	PTT	S2	S1	D3	SMA	SUPM	SMP	SD
(1)	(2)	(3)				(4)					(5)						
	b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana TPI	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	c. Seksi Pengawasan, Pelaporan dan Pengelolaan TPI	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	2	-	3	-	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
5.	**Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan Budidaya**	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	a. Seksi Pembinaan Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Seksi Perbenihan dan Penyakit Ikan	-	-	-	1	-	1	-	-		-	1	-	-	-	-	-
	c. Seksi Perizinan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	2	2	1	-	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	**Kepala UPTD Balai Benih Perikanan Pantai (BBIP)**	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	a. Subbag Tata Usaha BBIP	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	b. Kasubsi Produksi dan Pelayanan Teknis	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	c. Kasubsi Standarisasi dan Informasi	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	d. Staf PNS	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	e. Staf Non PNS	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	2	-	-	1
16.	**Petugas Fungsional (Penyuluh)**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**-**	**1**	**4**	**15**	**5**	**28**	**24**	**-**	**37**	**5**	**27**	**5**	**43**	**8**	**3**	**3**

GRAFIK I.1.

GRAFIK SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018

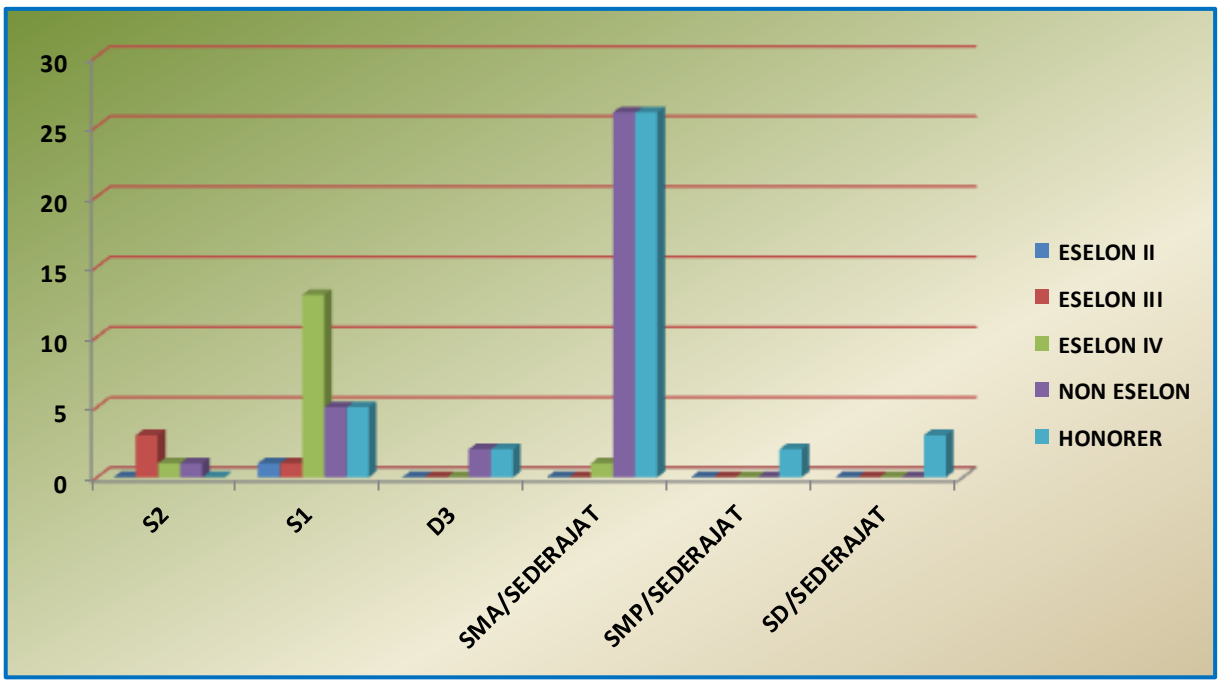

Sumber : Laporan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018

1.6. Sistematika Penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Program dan Kegiatan Anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama Pada SKPD
2. Membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

GAMBAR I.1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

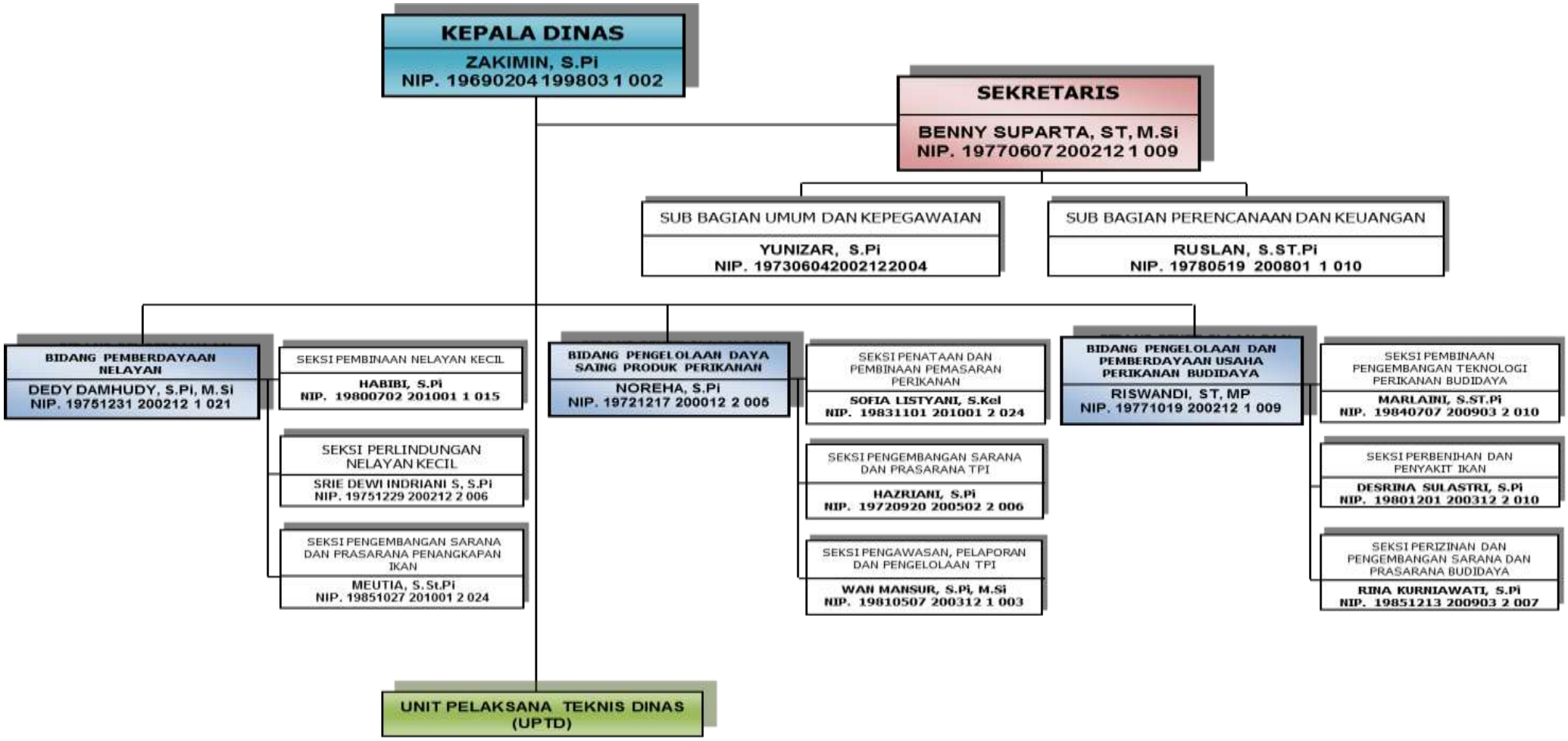

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RPJMD Tahun 2016 - 2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai *(desired future)* dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Kabupaten Natuna periode 2016-2021 adalah:

"MASYARAKAT NATUNA YANG CERDAS DAN MANDIRI DALAM KERANGKA KEIMANAN DAN BUDAYA TEMPATAN"

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- Masyarakat yang **Cerdas** yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.
- Masyarakat yang **Mandiri** artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian

dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

- Kerangka **Keimanan** artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religious dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.
- Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. **Masyarakat berbudaya** memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut.

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumberdaya alam potensial daerah;
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;

3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan petani;
4. Membuka keterisoliran daerah/desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan;
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya melayu sebagai payung pembangunan daerah;
6. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

2.2. Rencana Strategis

Rencana Strategis Pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna merupakan kerangka acuan (*guard line*) kebijakan, indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gambaran dan jawaban dari permasalahan sektor kelautan dan perikanan itu sendiri. Rencana strategis ini merupakan alat bantu dalam mengukur efektivitas dari kinerja sumberdaya manusia pada instansi bersangkutan.

2.2.1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang atau keinginan kedepan yang diharapkan. Adapun perumusan Visi Bupati Kabupaten Natuna yang dijalankan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut : ***"Masyarakat Natuna Yang Cerdas Dan Mandiri Dalam Kerangka Keimanan Dan Budaya Tempatan"***. Dari visi tersebut dapat diartikan bagaimana cara pandang atau keinginan serta harapan kedepan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam membangun dan mendayagunakan sumberdaya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan. Dalam mencapai visi tersebut maka Dinas Perikanan kabupaten Natuna menjalankan Misi Bupati Kabupaten Natuna

dalam memberi arah kebijakan bagi pembangunan disektor perikanan, adapun misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah;
2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani;
3. Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat.

Kesatuan visi dan misi dalam pembangunan perikanan memang memerlukan suatu proses yang memakan waktu lama tapi sangatlah diperlukan agar tercapainya kesinambungan dalam kegiatan pemanfaatan sumberdaya yang akhirnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat nelayan.

2.2.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi. Selain itu tujuan juga merupakan hal yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam periode tertentu atau jangka waktu 3 (tiga) sampai 5 (lima) tahun. Dengan adanya tujuan maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih dipertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Natuna yang dijalankan oleh Dinas Perikanan, maka dapat dirumuskan tujuan strategis yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan;
2. Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan;
3. Meningkatnya Kualitas Birokrasi Pemerintah.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur serta hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran strategis yang diharapkan untuk dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan;
2. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan;
3. Menigkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Organisasi.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam menetapkan rencana kinerja tahunan serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen RPJMD Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021.

Indikator Kinerja Utama merupakan implementasi dari pernyataan misi, tujuan juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai selain itu Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Natuna dimana dalam pelaksananya dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama maka fokus organisasi Dinas Perikanan dapat lebih di pertajam dan memberikan arah bagi sasaran yang akan dicapai. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017, tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna serta Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2018 Tentang

Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, dimana penjabaran dari tujuan secara terukur yang merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Indikator Kinerja Utama yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah disajikan pada Tabel II.1.

TABEL II.1.
INDIKATOR KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URAIAN INDIKATOR	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					TAHUN - 1	TAHUN - 2	TAHUN - 3	TAHUN - 4	TAHUN - 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	754,82	1.600,82	2.046,82	2.692,82	3.338,82	3.984,82	3.984,82
			Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	48.698,05	76.541,62	90.541,62	104.541,62	118.541,62	132.541,62	132.541,62
Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)	90,07	109,93	119,86	129,79	139,72	149,65	149,65
			Jumlah Sistem Date Base Perikanan (Data Base Perikanan)	1	1	1	1	1	1	1
			Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg)	6.600.000	6.602.256	6.661.704	7.158.000	7.244.000	7.330.000	7.330.000

Sumber : RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2017-2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diharapkan dapat dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna adalah disajikan pada Tabel II.2.

TABEL. II.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NO	SASARAN	IKU	INDIKATOR SASARAN	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Produktifitas Sektor Perikanan (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan	92.588,44
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	1. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (%)	Nilai Tukar Nelayan	100

Sumber : Kumpulan Indikator kinerja Utama satuan kinerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2018

TABEL. II.3.
URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA

NO	SASARAN	IKU	INDIKATOR SASARAN	ALASAN PENGGUNAAN	SUMBER DATA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Produktifitas Sektor Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	Total Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
			Produksi Perikanan Budidaya	Total Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	2. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Total Jumlah Produk Perikanan Olahan	Dinas Perikanan
			Jumlah Sistem Date Base Perikanan (Data Base Perikanan)	Jumlah Produksi Perikanan dan Perikanan Olahan	Laporan Kegiatan Dinas Perikanan
			Tingkat Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg)	Angka Konsumsi Prkapita/Orang/Tahun X Jumlah Penduduk Natuna	Dinas Perikanan

Sumber : Kumpulan Indikator kinerja Utama satuan kinerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2018

Dari tabel di atas terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, dapat terealisasi dimana Jumlah Produksi Perikanan sebesar 94,74 %, Realisasi Produksi Perikanan secara umum tahun 2018 menunjukkan hasil yang cukup dimana pencapaian secara target dibawah tetapi pencapaian secara produksi meningkat. Produksi perikanan realisasinya mengalami penurunan persentase dimana hal ini disebabkan Benih rumput laut yang masih mengandalkan ketersediaannya di alam sangat terbatas dan tidak sesuai dengan kualitas mutu yang seharusnya, sedangkan pasca produksi atau pemasaran yang relatif harganya tidak stabil dan murah khususnya untuk produk rumput laut basah disebabkan permintaan pasar lebih kepada produksi rumput laut kering. Indikator Kinerja Utama mengenai Nilai Tukar Nelayan dapat terealisasi dengan baik dimana sebesar 100 %. Hal ini didapat melalui kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan yang digagas oleh pemerintah turut mendukung tercapainya realisasi.

2.4. Program Kerja dan Kegiatan

Secara ringkas keseluruhan rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun anggaran 2018 yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Natuna dimana dalam pelaksananya Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada kurun waktu 5 (lima) tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai sebagai berikut :

TABEL II.4.

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	
			SATUAN	VOLUME
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1. Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	**A. Pengembangan Budidaya Perikanan**	**Ton**	**2.046,82**
		1. Pendampingan Pada Kelompok Tani Budidaya Ikan	Kelompok	10
		2. Pengembangan BBIP	Ekor	17.000
		3. Pengembangan dan Penyediaan Budidaya Air Tawar	Ekor	20.000
		B. Pengembangan Perikanan Tangkap	**Ton**	**90.541,62**
		1. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Orang	200
		2. Pelatihan Penangkapan/ Penanganan Ikan Yang Ramah Lingkungan	Orang	60
		3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	OK	180
2. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	**A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**	**Ton**	**109,93**
		1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kelompok	13
		B. Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan	**Kg**	**6.602.256**
		1. Penyediaan Data Base Kelautan dan Perikanan	Dokumen	1
		2. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	OK	320

TABEL II.5.
ANGGARAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1. Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	**A. Pengembangan Budidaya Perikanan**	**1.033.243.876**
		1. Pendampingan Pada Kelompok Tani Budidaya Ikan	400.000.000
		2. Pengembangan BBIP	629.683.876
		3. Pengembangan dan Penyediaan Budidaya Air Tawar	3.560.000
		B. Pengembangan Perikanan Tangkap	**431.281.100**
		1. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	70.264.000
		2. Pelatihan Penangkapan/ Penanganan Ikan Yang Ramah Lingkungan	361.017.100
		3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	758.950.000
2. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	**A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**	**570.000.000**
		1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	570.000.000
		B. Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan	**1.027.009.000**
		1. Penyediaan Data Base Kelautan dan Perikanan	634.694.000
		2. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	392.315.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja sasaran. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Tahun 2018 merupakan pendorong atau pemicu terhadap terealisasinya sasaran seperti yang ditargetkan. Dalam laporan pengukuran kinerja ini diuraikan kinerja Program dan Kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa rencana Kinerja Dinas Perikanan pada Tahun 2018 telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan 2 (dua) Tujuan yang tercakup dalam 4 (empat) Program yang tersebar dalam 7 (tujuh) Kegiatan.

Analisis capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018 yang mencakup 2 (dua) sasaran strategis telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2018 yang disajikan berdasarkan sistematika pernyataan Misi Bupati pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini :

MISI PERTAMA **Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial Daerah**

Tujuan **Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perikanan**

Sasaran
Meningkatnya Produksi Perikanan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	92.588,44	87.717,92	94,74

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi sebesar dimana Produksi Perikanan sebesar 94,74 %. Data tersebut merupakan laporan produksi dari setiap Kantor Cabang Dinas Perikanan dimana nelayan dan pembudidaya ketika akan melakukan penjualan hasil tangkapan dan budidayanya melaporkan kepada Kantor Cabang, selain itu melakukan pengumpulan data dengan mendatangi tempat-tempat penjualan hasil nelayan dan pembudidaya.

Pembandingan yang dilakukan antara realisasi dengan target menunjukkan bahwa semua target dapat dipenuhi dengan baik. Hal ini didapat melalui kerjasama yang baik dari semua pihak (stakeholder) yang terkait sehingga hasil yang diharapakan dapat tercapai. Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam bidang kelautan dan perikanan berjalan dengan baik memberikan hasil dari sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya maupun produktivitas perikanan secara umum. Hasil yang dicapai pada Tahun 2018 bila dibandingkan dengan Tahun 2017 bisa dilihat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	TARGET AKHIR RENSTRA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Jumlah Produksi Perikanan	Ton	88.888,27	87.717,92	136.526,44

Dari tabel di atas terlihat Realisasi secara umum antara tahun 2017 dengan 2018 menunjukkan hasil yang cukup, dimana pada produksi perikanan pada tahun 2018 realisasinya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2017, dimana hal ini disebabkan Benih rumput laut yang masih mengandalkan ketersediaannya di alam sangat terbatas dan tidak sesuai dengan kualitas mutu yang seharusnya, sedangkan tempat pengeringan rumput laut masih terbatas karena tidak tersedianya dataran yang sesuai untuk dimanfaatkan karena topografi daerah yang cenderung berbukit. Permasalahan yang utama adalah pasca produksi atau pemasaran yang relatif harganya tidak stabil dan murah khususnya untuk produk rumput laut basah disebabkan permintaan pasar lebih kepada produksi rumput laut kering.

Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2018 telah menetapkan 2 (dua) program pendukung indikator sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

MISI KETIGA

Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani

Tujuan

Meningkatkan Taraf Hidup Nelayan

Sasaran

Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai Tukar Nelayan	%	100	100	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, dapat terealisasi dengan baik dimana sebesar 100 %. Hal ini didapat melalui kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang didukung dengan adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pembentukan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengolah dan memasarkan produk perikanan yang digagas oleh pemerintah turut mendukung tercapainya realisasi. Realisasi yang dicapai pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 dapat dilhat pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI 2017	REALISASI 2018	TARGET AKHIR RENSTRA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai Tukar Nelayan	%	100	100	100

Hal ini dihasilkan melalui pembentukan kelompok masyarakat perikanan, pembentukan kelompok masyarakat ini bertujuan memperkuat produksi perikanan di Kabupaten Natuna. Pembentukan kelompok tersebut didukung dengan pemberian fasilitas bagi kegiatan perikanan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,hal inilah yang mampu meningkatkan persentase realisasi pada indikator kinerja sasaran tentang nilai tukar nelayan pada Tahun 2018 dan Tahun 2017. Terkait dengan sasaran yang hendak dicapai diatas, Dinas Perikanan Kabupaten

Natuna pada Tahun 2018 telah menetapkan program sebagai pendukung indikator sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
2. Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan.

Penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten mengalami peningkatan, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian kinerja yang diharapkan Dinas Perikanan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah .

3.2. Realisasi Anggaran

Pencapaian misi strategis yang yang telah ditargetkan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dan berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2017 tentang penjabaran APBD Kabupaten Natuna menetapkan alokasi anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Natuna berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja utama (IKU) seperti terlihat pada **tabel III.1.**

Sebagai bahan Akuntabilitas Keuangan dibawah ini disajikan Rekapitulasi Alokasi dan Realisasi penyerapan anggaran berdasarkan sasaran strategis guna mencapai 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) program sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018. Sebagaimana yang telah dikemukakan tentang rencana Kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2018 telah menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan 2 (dua) Tujuan yang tercakup dalam 4 (empat) Program yang tersebar dalam 7 (tujuh) kegiatan dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 2.669.218.976 (Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) hingga berakhirnya tahun anggaran 2018 telah terealisir sebesar Rp. 1.866.817.535 (Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau 69,94 %. Keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam mencapai target - target yang telah ditentukan pada tahun 2018 merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen dari seluruh pegawai Dinas Perikanan. Pekerjaan yang dilakukan melalui manajemen yang baik yang diadakan oleh Dinas Perikanan merupakan faktor dasar yang sangat penting dalam melaksanakan seluruh kegiatan. Faktor penting lainnya yang mendukung keberhasilan adalah dukungan dari stakeholder yang terkait seperti :

1. Pemerintah Kabupaten Natuna, memberikan kemudahan - kemudahan dalam melaksanakan kegiatan, pemberian dana yang memadai, maupun petunjuk - petunjuk pelaksanaan yang baik. Hal ini termasuk dukungan dari instansi - instasi terkait sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat berjalan baik;
2. Pemerintah Pusat, berperan sangat penting dalam mendukung keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Perikanan. Dukungan dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah pemberian dana yang sangat memadai. Banyak program yang diluncurkan dalam usaha memajukan sektor kelautan dan perikanan seperti Program PSKPT (Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu) yang merupakan program yang sangat besar untuk membangun pelabuhan perikanan beserta seluruh fasilitas pendukung

yang bersifat nasional. Selain pembangunan pelabuhan perikanan diluncurkan program peningkatan Budidaya Perikanan di Kabupaten Natuna serta Program Pendukung Pengolahan Hasil Perikanan. Program lain yang diluncurkan adalah pemberian kartu nelayan beserta pemberian asuransi nelayan bagi kalangan nelayan dengan tujuan memberikan ketenangan bagi nelayan maupun keluarganya dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari sehingga diharapkan hasil yang didapat berupa produksi perikanan dapat meningkat;

3. Para Penyuluh Perikanan, memberikan dukungan berupa pendampingan bagi masyarakat pesisir baik nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah perikanan. Aktifitas para penyuluh yang sehari-hari mendampingi masyarakat di lapangan sangat membantu dalam meningkatkan usaha mereka dalam mengolah sumberdaya alam yang ada. Selain pendampingan usaha, para penyuluh juga mendampingi masyarakat dalam berhubungan dengan instansi-instansi pemerintah dan dunia usaha.

TABEL III.1.

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERIKANAN KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	REALISASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1. Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan	**A. Pengembangan Perikanan Tangkap**	**Ton**	**90.541,62**	**87.248,26**
		1. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Orang	200	150

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	REALISASI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		2. Pelatihan Penangkapan/ Penanganan Ikan Yang Ramah Lingkungan	Orang	60	45
		3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	OK	180	198
		B. Pengembangan Budidaya Perikanan	**Ton**	**2.046,82**	**469,66**
		1. Pendampingan Pada Kelompok Tani Budidaya Ikan	Kelpok	10	10
		2. Pengembangan BBIP	Ekor	17.000	18.000
		3. Pengembangan dan Penyediaan Budidaya Air Tawar	Ekor	20.000	15.000
2. Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Nilai Tukar Nelayan	**A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**	**Ton**	**119,86**	**120,04**
		1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kelpok	13	13
		B. Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan	**Jumlah Sistem Date Base Perikanan**	**1**	**1**
		1. Penyediaan Data Base Kelautan dan Perikanan	Dok	1	1
		2. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	OK	320	346

TABEL III.2.
REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	URAIAN	ANGGARAN			TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)
		ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Program Pengembangan Perikanan Tangkap**	**1.190.231.100**	**800.393.287**	**67,25**	**96,36**
	1. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	70.264.000	28.352.000	40,35	75
	2. Pelatihan Penangkapan/ Penanganan Ikan Yang Ramah Lingkungan	361.017.100	57.575.800	15,95	75
	3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	758.950.000	714.465.487	94,14	110
2.	**Program Pengembangan Budidaya Perikanan**	**1.033.243.876**	**812.206.000**	**78,61**	**22,95**
	1. Pendampingan Pada Kelompok Tani Budidaya Ikan	400.000.000	254.327.900	63,58	100
	2. Pengembangan BBIP	629.683.876	554.328.100	88,03	105,88
	3. Pengembangan dan Penyediaan Budidaya Air Tawar	3.560.000	3.550.000	99,72	75,00
3.	**Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir**	**570.000.000**	**424.479.138**	**74,47**	**100,15**
	1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	570.000.000	424.479.138	74,47	100
4.	**Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan**	**1.027.009.000**	**871.943.197**	**84,90**	**106,79**
	1. Penyediaan Data Base Kelautan dan Perikanan	634.694.000	544.204.597	85,74	100
	2. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	392.315.000	327.738.600	83,54	108,12

Akuntabilitas kinerja juga dibarengi dengan akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna pada Tahun 2018 dengan total belanja sebesar Rp. 11.656.419.543,00, namun saat pengesahan APBD perubahan mengalami pengurangan menjadi Rp.10.826.173.496,00. Secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat dijelaskan bahwa dari jumlah belanja langsung sebesar Rp. 6.199.993.696,00 dialokasikan sebesar Rp. 3.820.483.976,00 untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.909.021.622.00 atau 76,14 persen, sedangkan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 97,37 persen.

Efisiensi anggaran Tahun 2018 sebesar 61,62 persen, persentase ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan belanja langsung, Inefisiensi anggaran sebesar 38,38 persen. Dibandingkan dengan Tahun 2017 anggaran yang mendukung indikator kinerja utama sebesar Rp. 10.699.624.400,00 66,83 persen dengan jumlah belanja langsung sebesar Rp. 16.010.401.400,00, dimana inefisiensi sebesar 33,17 persen.

Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018 belum dapat menekan angka inefisiensi sebesar 5,21 persen dari Tahun 2017 hal ini sebabkan banyaknya kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami pengurangan anggaran. Diupayakan Tahun 2019 Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat menurunkan angka inefesiensi tersebut, sehingga anggaran belanja langsung lebih banyak lagi mendukung Indikator Kinerja Utama.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan dalam pencapaian misi dan tujuan serta dalam rangka perwujudan "*good governance*". Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi Dinas Perikanan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.Telah ditetapkan rencanaan kinerja yang menjadi komitmen Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dalam melaksanakan pembangunan tahun 2018. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasikan upaya Dinas Perikanan untuk mewujudkan Visi, dan misi yang telah ditetapkan yaitu meliputi 3 (tiga) sasaran strategis yang tercermin dari indikator sasaran yang dilaksanakan dalam 8 (delapan) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Indikator kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2018 tersebut merupakan parameter untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dalam menyelenggaraan pemerintahan yang merupakan komitmen instansi pemerintahan Dinas Perikanan Kabupaten Natuna. Alokasi anggaran belanja langsung Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna yang tersedia melalui APBD Kabupaten Natuna tahun 2018 untuk pelaksanaan Kinerja tersebut adalah sebesar Rp. 3.820.483.976,-. Dikaitkan dengan pencapaian sasaran kinerja yaitu **Meningkatnya Produksi Perikanan** menyerap anggaran yakni Rp. 2.223.474.976,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.612.599.287,- atau 72,53 % dan **Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan** menyerap anggaran yakni Rp. 1.597.009.000,-

dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.296.422.335,- atau 81,18 %. Untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Natuna serta strategi Dinas Perikanan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

TABEL IV.1.
ALOKASI DAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2018

SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Meningkatnya Produksi Perikanan	2.223.474.976	1.612.599.287	72,53
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	1.597.009.000	1.296.422.335	81,18
TOTAL	**3.820.483.976**	**2.909.021.622**	**76,14**

TABEL IV.2.
TAGRET DAN REALISASI PENYERAPAN KINERJA
BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN ANGGARAN 2018

SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
Meningkatnya Produksi Perikanan (Ton)	92.588,44	87.717,92	94,74
Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan (%)	100	100	100

Mengacu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018 yang telah disusun, maka capaian kinerja keuangan pada tahun 2018 sebesar 76,14 % dan tingkat kinerja berdasarkan sasaran strategis pada tahun 2018 sebesar 94,74 % untuk meningkatnya produksi perikanan dan 100 % untuk meningkatnya kesejahteraan nelayan. Bila ditinjau dari klasifikasi capaian kinerjanya maka capaian tahun 2018 tergolong dalam kategori ”A”. Seluruh capaian kinerja telah berhasil sepenuhnya tercapai serta telah memberikan pelajaran yang berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang (adanya beberapa Program/Kegiatan tidak jalan seluruhnya akibat Pemangkasan/Anggaran Perubahan (***RESHEDULE***).

Untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna ditahun mendatang, maka perlu dilakukan berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian indikator kinerja. Adapun upaya strategis yang dapat ditempuh tersebut antara lain :

1. Lebih meningkatkan kecermatan dalam penetapan rencana kegiatan yang diikuti pengendalian agar hasil pelaksanaan kegiatan lebih berhasil guna dan berdaya guna;
2. Lebih mendayagunakan secara optimal sumber daya manusia yang ada sebagai penggerak dan pelaku pelaksanaan pembangunan diikuti dengan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Lebih meningkatkan efisiensi, ekonomis, efektifitas pelaksanaan kegiatan dan program agar dapat mencapai sasaran dan tujuan kegiatan dikaitkan dengan upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Natuna sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Natuna;

4. Agar Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dapat memberikan informasi yang memadai perlu dilakukan berbagai perbaikan terhadap pengumpulan data dan informasi yang diperlukan khususnya terkait dengan sistem pengumpulan data kinerja dan penetapan indikator kinerja sasaran.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Natuna Tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (*feedback*) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Natuna dimasa datang.

Ranai, *28* Januari 2019

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN NATUNA

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA DINAS PERIKANAN

ZAKMIN, S.Pi
NIP. 19[illegible]204 199803 1 002

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	**ZAKIMIN, S.Pi**
Jabatan	:	KEPALA DINAS PERIKANAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	:	**Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si**
Jabatan	:	BUPATI

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ranai, 22 Oktober 2018

Pihak Kedua,	Pihak Pertama
Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si	**ZAKIMIN, S.Pi**
	NIP. 19690204 199803 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERIKANAN

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	90.541,62
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.046,82
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	119,86
		Jumlah Sistem Date Base Perikanan	Sistem Date Base	1

Jumlah Anggaran :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.920.774.720
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	457.500.000
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	52.500.000
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	100.000.000.00
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp.	570.000.000
- Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp.	1.033.243.876
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.	431.281.100
- Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan	Rp.	634.694.000
Jumlah	**Rp.**	**6.199.993.696**

Kabupaten, 22 Oktober 2018

Pihak Kedua,

Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si

Pihak Pertama

ZAKIMIN, S.Pi
NIP. 19690204 199803 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2018
DINAS PERIKANAN

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	87.248,26	96,36
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	469,66	22,95
2.	Meningkatnya Kesejahteraan Nelayan	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	120,04	100,15
		Jumlah Sistem Date Base Perikanan	Sistem Date Base	1	1

Jumlah Anggaran :

Program		Pagu		Realisasi	%
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp.	2.920.774.720.00	Rp.	2.405.278.411.00	82,35
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp.	457.500.000.00	Rp.	332.716.800.00	72,72
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp.	52.500.000.00	Rp.	11.705.900.00	22,30
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.	100.000.000.00	Rp.	41.962.072.00	41,96

Program		Pagu		Realisasi	%
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp.	570.000.000.00	Rp.	424.479.138.00	74,47
- Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp.	1.033.243.876.00	Rp.	812.206.000.00	78,61
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp.	431.281.100.00	Rp.	85.927.800.00	19,92
- Program Penyediaan Sistem Informasi dan Data Base Produksi Perikanan	Rp.	634.694.000.00	Rp.	544.204.597.00	85,74
Jumlah	**Rp.**	**6.199.993.696.00**	**Rp.**	**4.658.480.718.00**	**75,14**

Ranai, 31 Desember 2018

Pihak Kedua,

Drs. H. ABDUL HAMID RIZAL, M.Si

Pihak Pertama

ZAKWAN, S.Pi

NIP. 19690204 199803 1 002